

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini sektor pariwisata di Indonesia sudah mulai menguat pasca pandemi meski belum masuk level prapandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2023 secara kumulatif telah mencapai 2,5 juta kunjungan atau naik 508,7% dibandingkan pada periode tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat akhir tahun 2023 bisa menembus kurang lebih sebanyak 9-10 juta kunjungan.

Sektor pariwisata adalah salah satu penopang sumber perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada laporan Tourism Trends and Policies 2022 disebutkan pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Akan tetapi pandemi Covid-19 di 2020 menyebabkan turunnya kontribusi pariwisata terhadap PDB sebanyak 56% yaitu hanya menjadi sebesar 2,2% dari total ekonomi. Transisi pandemi menjadi endemik merupakan momentum untuk pariwisata nasional supaya bangkit lebih kuat. Dikutip dari dokumen KEM PPKF 2023, The Internasional Air Transport Association (LATA) memperkirakan angka perjalanan internasional akan meningkat signifikan pada tahun 2023, dan berpotensi melampaui

level pra pandemi pada saat tahun 2024. Akan begitu dengan sektor penunjang pariwisata seperti sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang tinggi. Dapat dilihat melalui banyaknya objek wisata di Kota Semarang dan banyaknya wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. (Aji & Subowo2, n.d.)

Tabel 1.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Jenis Wisatawan di Kota Semarang (Jiwa) pada Tahun 2020-2023

Jenis Wisatawan	2023	2022	2021	2020
Wisatawan Nusantara	6.478.883	5.388.233	2.663.648	3.260.303
Wisatawan Mancanegara	13.992	4.918	77	6.628
Kota Semarang	6.492.875	5.343.151	2.663.761	3.226.931

Sumber:Badan Pusat Statistika, Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dengan objek wisata yang cukup banyak dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan akibat

pandemi. Realisasi jumlah kunjungan wisatawan juga telah melampaui target yang ditentukan.(Aji & Subowo2, n.d.)

Tabel 1.2

Jumlah Pengunjung Menurut Jenis Objek Wisata di Kota Semarang 2020-2023

Jenis Objek Wisata	Pengunjung 2023	Pengunjung 2022	Pengunjung 2021	Pengunjung 2020
Budaya	4.641.338	2.819.236	265.587	521.860
Bahari	977.203	886.918	441.557	429.251
Pertanian	17.873	14.929	2.557	3.241
Alam	1.251.826	1.321.853	254.610	433.860
Sejarah	3.805.497	2.819.236	607.983	523.860
Religi	273.438	267.448	149.021	112.222
Pendidikan	668.697	312.664	251	920
Kuliner	4.298.134	3.574.125	111.907	777.742
Belanja	5.279.249	4.792.019	2.329.971	1.872.882
Buatan	2.669.288	2.482.882	606.486	3.207.951

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2021 menurun sangat banyak di sejumlah jenis objek wisata dikarenakan pandemi Covid-19. Intensitas pengunjung yang menurun mengakibatkan menurunnya pendapatan kota dan negara. Sehingga hal tersebut mendorong Pemerintah Kota

Semarang menggali potensi wisata di berbagai sektor jenis wisata seperti wisata budaya dan sejarah. Proses kebijakan yang akan dibuat juga menyesuaikan terhadap kondisi daerahnya itu sendiri yaitu desa atau kota. Kebijakan pariwisata seringkali berbasis keindahan alam atau wisata kuliner. Secara nyata pemerintah kota memanfaatkan pendekatan pada wisata sejarah sebagai cara pembangunan proyek kota. Kegiatan Pariwisata tersebut memanfaatkan pendekatan wisata sejarah yaitu revitalisasi Kota Lama Semarang.

Kota Lama Semarang adalah Kawasan yang pada awalnya menjadi pusat pemerintahan di Kota Semarang oleh Belanda pada saat itu. Selain itu Kawasan Kota Lama Semarang jika dilihat dari sejarah adalah asal usul dari pembangunan yang ada di Kota Semarang pada masa sekarang. Kawasan Kota Lama Semarang mempunyai luas sekitar kurang lebih 31ha. Kawasan tersebut pada zaman dahulu merupakan pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan, dengan bangunan-bangunan yang indah dan mengandung nilai sejarah yang kini tak berfungsi secara optimal. Sebagian besar bangunan terlihat tak terawat, berkesan tidak berpenghuni bahkan seperti kota mati karena sepi wisatawan yang mengunjungi objek wisata Kota Lama Semarang. (Aji & Subowo2, n.d.)

Kota Lama merupakan salah satu pusaka yang dimiliki oleh Kota Semarang. Kota Lama pada masa dahulu merupakan pusat Kota Semarang sehingga memiliki berbagai macam Gedung yang bernilai sejarah tinggi. Pada saat ini masih terdapat banyak Gedung peninggalan Belanda yang masih terlihat kokoh berdiri, diantaranya

adalah Gereja GPIB Immanuel (Gereja Beleduk), Gedung Marabunta, Stasiun Tawang, Pabrik Rokok “Praoe Layar” Jembatan Berok, serta bangunan-bangunan peninggalan belanda lainnya yang masih banyak sekali tersebar di Kawasan tersebut. Sebagai pusat kota pada masa kolonial belanda, Kawasan ini berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk Belanda dan Eropa, serta etnis Tionghoa yang rata-rata memiliki profesi sebagai pedagang. Tetapi karena terlalu lama tidak difungsikan, kemudian pada saat ini beberapa lokasi Kawasan Kota Lama dimanfaatkan secara ilegal oleh gelandangan. Sementara beberapa lokasi lain digunakan menjadi fasilitas pergudangan. (Alya Putri et al., n.d.)

Melihat kondisi tersebut yang terjadi di Kota Lama Semarang, untuk itu usaha melestarikan dan meningkatkan kondisi baik fisik lingkungan, social, dan ekonomi di Kota Lama Semarang, salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali Kota Lama Semarang dengan pengembangan Kawasan Kota Lama Semarang dalam rangka revitalisasi Kota Lama Semarang. Revitalisasi adalah suatu upaya untuk menghidupkan Kawasan, bangunan-bangunan, dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural. Pada umumnya revitalisasi memiliki makna sebagai pengembalian kembali Kawasan dengan memasukan fungsi atau kegiatan baru secara modern, agar Kawasan tersebut menjadi lebih bagus, aktif, dan mengundang banyak pengunjung bagi pariwisata tersebut. (Aji & Subowo2, n.d.)

Sebelum terbitnya SK Walikota Semarang Nomor 6/50/1992 tentang Pelestarian Bangunan Tua/Bersejarah Di Kawasan Kota Lama Semarang, UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992). Sejak saat itu Kota Semarang mulai bertindak melestarikan bangunan bersejarah dengan menyusun daftar bangunan yang termasuk dalam bangunan cagar budaya. Dengan berlakunya undang-undang tentang Pelestarian Benda Cagar Budaya, undang-undang tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010). (Alya Putri et al., n.d.)

Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang mulai dikerjakan pada tahun 2017 dengan dukungan dari pemerintah pusat yang melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membantu Walikota Semarang untuk mendorong adanya perubahan di Kawasan yang memiliki banyak nilai sejarah. Revitalisasi dengan disertai memanfaatkan berbagai Gedung-gedung tua di Kawasan Kota Lama Semarang diubah menjadi Kawasan ekonomi dan bisnis. Dalam pemanfaatan Gedung-gedung tersebut dapat dijadikan sebagai perkantoran, restoran, café, bahkan dapat menjadi tempat wisata yang tidak kumuh dan rawan terhadap kriminalitas. Kemudian bangunan lain juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk galeri seni dan dapat dijadikan untuk pameran produk UMKM, untuk mempromosikan potensi UMKM yang ada di Kota Semarang terhadap masyarakat dan pengunjung Kota Lama Semarang.

Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan pariwisata di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini diperuntukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berada di kawasan Kota lama. Peralihan fungsi kawasan Kota Lama menjadikan masalah yang harus segera diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama. Program revitalisasi merupakan implementasi dari peraturan daerah tersebut dan dijadikan sebagai upaya untuk memvitalkan kembali fungsi kawasan kota lama dan menerapkan fungsi baru yang modern sehingga dapat mengubah citra kawasan dan berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya.

Tabel 1.3

Anggaran Revitalisasi Kota Lama Semarang Pada Tahap I dan Tahap II

1	Tahap I	Rp. 156.372.608.000
2	Tahap II	Rp. 64.143.267.073

Sumber: Arsip Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman wilayah Jawa Tengah

Pada revitalisasi Kota Lama Tahap I Pemerintah Kota Semarang yang dibantu BPK2L dan Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya melakukan penataan Kawasan Kota Lama Semarang supaya lebih nyaman sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata yaitu meliputi penataan sarana dan prasarana seperti kabel telepon, PDAM dan kabel listrik.

Kemudian pada titik titik tertentu dapat diberikan tempat duduk Panjang, tempat sampah dan lampu penerangan jalan utama serta trotoar, pada program revitaliasi tahap I Kota Lama Semarang dimulai pada tahun 2017. Dalam melaksanakan program revitalisasi tersebut terdapat berbagai macam masalah seperti sulitnya mensterilkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di dalam Kawasan Kota Lama dan masih banyaknya aktifitas premanisme dan bahkan prostitusi yang merupakan masalah terbesar dan tantangan untuk Pemerintah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi Kawasan Kota Lama tersebut. Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang tahap 2 fokus pada peningkatan infrastruktur dan penambahan fasilitas wisata, termasuk lampu jalan, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya. Tahap kedua ini memiliki anggaran sekitar Rp60 miliar dan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan fungsi baru di kawasan. (Aji & Subowo2, n.d.)

Program Revitalisasi adalah bagian strategi dan program kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang. Revitalisasi merupakan sebuah upaya pemberdayaan potensi Kota Semarang untuk salah satu Kawasan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada penyelenggaraan, pemberdayaan, dan pengembangan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang. Dalam keberhasilan sebuah program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang tentu tidak akan jauh dari suatu perencanaan yang matang melalui berbagai tahapan, demi terciptanya suatu kondisi yang bagus dan diinginkan. (Aji & Subowo2, n.d.)

Keadaan bangunan cagar budaya yang tidak terawat menjadi semakin buruk karena ditumbuhi oleh lumut dan semakin rapuhnya material bangunan. Aktivitas masyarakat juga terhambat karena di setiap sudut jalan digenangi oleh banjir yang pada akhirnya jalan-jalan di Kota Lama rusak. Bahkan pada tahun 2022, dilansir dari IDX Channel bahwa Kota Lama Semarang masih sempat terendam banjir akibat hujan deras. Masyarakat menjadi resah jika Kota Lama terus-menerus tergenang oleh banjir yang tidak kunjung usai akan berakibat pada menurunnya kualitas bangunan dan lingkungan di Kota Lama. Situs peninggalan dipertahankan bersejarah kelestariannya harus dengan perhatian yang khusus, termasuk kesiapan kelembagaan yang mengelolanya.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama (Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, batas kawasan perlindungan dan pemanfaatan situs Kota Lama, program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancang, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, pedoman pengendalian pelaksanaan, hak, kewajiban, larangan dan peran serta masyarakat, pembiayaan, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 pada Tanggal 12 Juli 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang. BPK2L sebagai Lembaga Non Struktural dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menghidupkan dan memfungsikan kembali kawasan Kota Lama guna melindungi bangunan kuno, meningkatkan kualitas tatanan lingkungan yang selaras, serta mengarahkan segala bentuk kegiatan pembangunan di kawasan tersebut. (Laksita Devi, n.d.)

Adapun keanggotaan BPK2L melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terdiri dari pakar-pakar konservasi cagar budaya, akademisi, dan praktisi di Kota Semarang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Kawasan Kota Lama menandakan bahwa tanggung jawab yang dijunjung Pemerintah Kota Semarang cukup besar. Sebagai kawasan prioritas, tentu Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun berbagai rencana pengelolaan.

Rencana pengelolaan Kawasan Strategis Kota Lama terdiri dari pemeliharaan dan pelestarian bangunan, revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan, serta pengembangan sistem kepariwisataan yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Kota Lama. Perencanaan tersebut tentu saja harus dituangkan dalam kebijakan yang berujung pada program dan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang. (Laksita Devi, n.d.)

Dengan kebijakan yang dibuat tersebut diharapkan semua rencana dapat terlaksana dengan maksimal. Kualitas Kawasan Kota Lama sempat mengalami penurunan. Baik pada kondisi bangunan secara fisik, fungsi, ataupun estetika. Dilansir dari Kompas, terdapat sosok Pak Sapto seorang perwakilan dari Badan Penanggulangan Cagar Budaya Semarang yang mengkritik pemerintah melalui pesan pesan bermakna satire.

Mengenai uraian diatas, hal tersebut yang melatarbelakangi penulis membuat penelitian dengan sumber pertanyaan yaitu **“Bagaimana Policy Output Implementasi Kawasan Kota Lama Semarang?”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana policy output implementasi revitalisasi kawasan Kota lama Semarang?
2. Apa faktor faktor pendorong dan penghambat Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis policy output implementasi pelaksanaan revitalisasi wisata Kota Lama Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendorong program revitalisasi wisata Kota Lama Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi civitas akademika di Universitas Diponegoro dan bagi seluruh elemen masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan pada Ilmu Administrasi Publik dibidang implementasi kebijakan publik.
- b. Mengembangkan pengetahuan dibidang implementasi kebijakan public terkait urgenitas pelaksanaan revitalisasi cagar budaya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menerapkan pengetahuan mengenai hasil Analisa implementasi dan mengembangkan penalaran penulis dibidang implementasi kebijakan publik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat dampak revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang melalui cagar pariwisata budaya. Hal tersebut dapat membantu terjadinya pelestarian wisata cagar budaya di Kota Semarang dan untuk mengoptimalkan kinerja kebijakan.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa jurnal yang ada dibawah ini penelitian yang dilakukan berpedoman pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk

menemukan bahan atau celah yang belum dikaji atau diteliti lebih lanjut. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan penelitian terdahulu dan tabel yang terlampir sebagai berikut:

Penelitian yang pertama yaitu, Implementasi Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi keberhasilan program KOTAKU terhadap penanganan permukiman kumuh di wilayah Pesisir Desa Randusanga Kulon, kecamatan Brebes. Namun ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan beberapa titik wilayah kembali terlihat kumuh, apalagi saat rob tiba. (Cahyani et al., 2023)

Penelitian yang kedua yaitu, Revitalisasi tahap pertama sudah sesuai dengan perencanaan dengan cukup banyak orang yang datang setelah tempat wisata dibuka kembali. Perbandingan waduk darma dahulu dengan sekarang mengalami perubahan, mulai dari sarana/prasarana pariwisata. (Putriady et al., 2022a)

Penelitian selanjutnya, Implementasi Kebijakan Revitalisasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyajikan gambaran tentang kebijakan revitalisasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Kinerja pengelola, keterlibatan masyarakat, sarana dan prasarana, dan keamanan adalah topik yang dibahas di dalam penelitian ini. Temuan Penelitian

menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan ini memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan wisata Budaya Setu Babakan.

Penelitian yang keempat yaitu, Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. Temuan penelitian menunjukkan Revitalisasi tahap pertama sudah sesuai dengan perencanaan dengan cukup banyak orang yang datang setelah tempat wisata dibuka kembali. Perbandingan waduk darma dahulu dengan sekarang mengalami perubahan, mulai dari sarana/prasarana pariwisata. (Putriady et al., 2022a)

Penelitian yang kelima yaitu, Implementasi Kebijakan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Benteng Willem II Ungaran. Temuan penelitian menunjukkan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang perlu memberikan intensif pengelolaan, dan pengurangan beban pajak pada bangunan benteng tersebut sebagai wujud pengalaman undang-undang cagar budaya dan itikad baik dalam kepentingan pelestarian sebuah cagar budaya bernilai tinggi. (*Dafpus Penelitian Terdahulu 5*, n.d.)

Penelitian selanjutnya adalah, Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan. Temuan penelitian menunjukkan, Pengembangan objek wisata belum berjalan secara optimal karena memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun stakeholder terkait tantangan tersebut berupa keterbatasan anggaran, dan keterbatasan sarana dan prasarana pada objek wisata Tapak Tuan Tapa.

Penelitian yang ketujuh adalah, Revitalisasi Tempat Wisata Dalam Pengembangan Wisata Budaya Desa Plunturan Ponorogo. Temuan Penelitian menunjukkan Proses revitalisasi Shor Zengon dilaksanakan sesuai dengan scenario penyusun. Namun dalam prakteknya, tidak semua material yang direncanakan dan dibangun ini bisa diwujudkan atau dilaksanakan, mengingat lebih mengutamakan bangunan yang lebih sesuai untuk didirikan di Shor Sengon dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. (Nurhadi et al., 2023)

Penelitian yang kedelapan yaitu, Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya. Temuan Penelitian menunjukkan, Ketepatan kebijakan implementasi kebijakan revitalisasi jalan panggung dinilai cukup optimal dalam upaya melestarikan bangunan bangunan yang ada pada Kawasan cagar budaya, namun dalam pelaksanaannya pemerintah kota Surabaya belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang signifikan untuk berkunjung pada jalan Panggung. (Adi Mahindra & Megawati, n.d.)

Penelitian yang kesembilan yaitu, *Collaborative Governance* Sebagai inovasi Kebijakan Strategis Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama. Temuan penelitian menunjukkan Bahwa *Collaborative Governance* yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam revitalisasi Kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) masih terdapat berbagai hambatan hambatan

dalam implementasinya seperti permasalahan relokasi pedagang kaki lima yang belum mau pindah dari Kawasan cagar budaya Banten Lama. (Sururi, 2018)

Penelitian selanjutnya yaitu, Implementasi Revitalisasi Kawasan Ekowisata Waduk Darma Studi kasus: Revitalisasi Tahap 1 Wisata Waduk Darma Desa Jagara Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Temuan penelitian menunjukkan Revitalisasi tahap pertama sudah sesuai dengan perencanaan, dengan cukup banyaknya orang yang datang setelah tempat wisata dibuka kembali. Perbandingan kondisi wisata waduk darma dahulu dengan sekarang mengalami perbedaan, mulai dari sarana/prasarana pariwisata. Dampak yang ditimbulkan revitalisasi tahap pertama dari segi bangunan menjadi lebih bagus, lebih bersih, lebih nyaman dan lebih indah. (Putriady et al., 2022b)

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Cahyani, 2023)	Implementasi Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes	Teori interaksi sosial dan manajemen perkotaan	Kualitatif, analisis data survey dan wawancara.	Keberhasilan program yang dilaksanakan oleh KOTAKU, memang merubah menjadi sedikit lebih tertata khususnya di dusun sigempol, karena dilakukan perbaikan jalan. Namun ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan beberapa titik wilayah kembali terlihat kumuh, apalagi saat rob tiba. (Cahyani et al., 2023)
2.	(Putriady dkk., 2022)	Implementasi Revitalisasi Kawasan Ekowisata Waduk Darma	Penelitian ini menggunakan teori pariwisata dan ekowisata	Kualitatif deskriptif, wawancara dan kuesioner	Revitalisasi tahap pertama sudah sesuai dengan perencanaan dengan cukup banyak orang yang datang setelah tempat wisata dibuka kembali. Perbandingan

					waduk darma dahulu dengan sekarang mengalami perubahan, mulai dari sarana/prasarana pariwisata. (Putriady et al., 2022a)
3.	(Yasmin, 2023)	Implementasi Kebijakan Revitalisasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan william Dunn	Kualitatif, <i>purposive sampling</i> .	Dalam revitalisasi tersebut masih banyak terdapat kekurangan dalam pengembangan pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Hasil revitalisasi diuji berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh William Dunn. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)
4.	(Mubdiatun,2023)	Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar	Penelitian ini menggunakan teori revitalisasi	Kualitatif dan kuantitatif	Efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dirasakan hampir sama antara

		Tradisional di Kota Surakarta	pasar tradisional serta partisipasi masyarakat.		pedagang dengan pengunjung. Aspek perbaikan fisik pasar dinilai lebih memberikan manfaat bagi pedagang dan pengunjung, sedangkan aspek manajemen pasar tradisional belum terlalu memberikan manfaat yang nyata baik bagi pedagang dan pengunjung. (Mubdiatun Nida, 2014)
5.		Implementasi Kebijakan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Benteng Williem II Ungaran	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan revitalisasi James Andeson dan	Kualitatif	Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang perlu memberikan intensif pengelolaan, dan pengurangan beban pajak pada bangunan benteng tersebut sebagai wujud pengalaman undang-undang

			teori cagar budaya		cagar budaya dan itikad baik dalam kepentingan pelestarian sebuah cagar budaya bernilai tinggi. Hal ini untuk memberikan peluang fungsi cagar budaya agar dapat terlestarikan dengan seharusnya tanpa adanya intervensi salah satu pihak. <i>(Daftus Penelitian Terdahulu 5, n.d.)</i>
6.	(Amalia, 2023)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan	Kualitatif	Pengembangan objek wisata belum berjalan secara optimal karena memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun <i>stakeholder</i> terkait tantangan tersebut berupa keterbatasan anggaran, dan

					keterbatasan sarana dan prasarana pada objek wisata Tapak Tuan Tapa.
7.	(Nurhadi dkk, 2023)	Revitalisasi Tempat Wisata Dalam Pengembangan Wisata Budaya Desa Plunturan Ponorogo	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan	Kualitatif	Proses revitalisasi Shor Zengon dilaksanakan sesuai dengan scenario penyusun. Namun dalam prakteknya, tidak semua material yang direncanakan dan dibangun ini bisa diwujudkan atau dilaksanakan, mengingat lebih mengutamakan bangunan yang lebih sesuai untuk didirikan di Shor Sengon dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. (Nurhadi et al., 2023)

8.	(Adi, 2023)	Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya	Penelitian ini menggunakan teori kebijakan implementasi dan implementasi	Kualitatif	Ketepatan kebijakan implementasi kebijakan revitalisasi jalan panggung dinilai cukup optimal dalam upaya melestarikan bangunan bangunan yang ada pada Kawasan cagar budaya, namun dalam pelaksanaannya pemerintah kota Surabaya belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang signifikan untuk berkunjung pada jalan Panggung. (Adi Mahindra & Megawati, n.d.)
9.	(Sururi Ahmad, 2022)	Collaborative Governance Sebagai inovasi Kebijakan Strategis Studi Revitalisasi Kawasan	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dan	Kualitatif	Bahwa <i>Collaborative Governance</i> yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang

		Wisata Cagar Budaya Banten Lama.	Teori kebijakan revitalisasi		dalam revitalisasi Kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang tertuang dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) masih terdapat berbagai hambatan hambatan dalam implementasinya seperti permasalahan relokasi pedagang kaki lima yang belum mau pindah dari Kawasan cagar budaya Banten Lama. (Sururi, 2018)
10.	(Putriady, 2021)	Implementasi Revitalisasi Kawasan Ekowisata Waduk Darma Studi kasus: Revitalisasi Tahap 1 Wisata Waduk Darma Desa Jagara Kecamatan	Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi dan Revitalisasi	Kualitatif	Revitalisasi tahap pertama sudah sesuai dengan perencanaan, dengan cukup banyaknya orang yang datang setelah tempat wisata dibuka kembali. Perbandingan

		Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat.			kondisi wisata waduk darma dahulu dengan sekarang mengalami perbedaan, mulai dari sarana/prasarana pariwisata. Dampak yang ditimbulkan revitalisasi tahap pertama dari segi bangunan menjadi lebih bagus, lebih bersih, lebih nyaman dan lebih indah. (Putriady et al., 2022b)
--	--	---	--	--	--

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano Administrasi Publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan anggota publik dikoordinasikan dan diorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (Keban,2014). Administrasi Publik dapat menjadi kompleks dalam pengelolaan publik supaya tercipta pelayanan yang seutuhnya maksimal kepada masyarakat.

Banyak hal yang dapat dikelola oleh negara dalam rangka pelayanan untuk masyarakat oleh karena itu peran Administrasi Publik sangat utama dengan berbagai dinamika tuntutan masyarakat. Adanya tuntutan yang semakin sebanyak dapat memunculkan ide dalam perkembangan administrasi publik untuk menjawab tuntutan dan tantangan dalam keberhasilan mengelola negara. (Astuti et al., n.d.)

Menurut Francis Donovan dan Alun C. Jackson, Administrasi public merupakan arahan, perintah, kegiatan implementasi, penciptaan prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa public, sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis. (Astuti et al., n.d.)

Menurut Nicholas Henry (2008:8) dalam buku Deddy Mulyadi mendefinisikan Administrasi Publik merupakan suatu percampuran yang kompleks antara praktek dan teori yang memiliki tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya terhadap masyarakat yang diperintah dan untuk mendorong kebijakan publik supaya lebih responsif kepada kebutuhan sosial.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

A. Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)

Dalam paradigma pertama Dikotomi Politik Administrasi yaitu membedakan antara politik dan fungsi pemerintahan sebagai dalam bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pemahaman tersebut digagas oleh Woodrow Wilson dalam Publikasi esai “*The Study of Administration*” yang dimuat dalam *Political Science Quarterly*, tahun 1897 (Basheka,2012). Woodrow Wilson menyatakan bahwa ada empat persyaratan administrasi publik yang efektif, yaitu, (1) pemisahan politik dan administrasi; (2) analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta; (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian dan (4) meningkatkan efektivitas layanan public melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Dalam paradigma tersebut memberikan pedoman landasan yang kuat terhadap teori administrasi public. Paradigma ini memberikan orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan antara “fakta” dan “nilai” (henry,2007).(Astuti et al., n.d.)

B. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Dalam paradigma yang kedua prinsip-prinsip administrasi, paradigma ini diawali dengan terbitnya buku “*Principles of Public Administration*” karya W. F. Willoughby pada tahun 1927 (Willoughby, 1927). Selain itu beberapa karya lainnya yang menonjol adalah “*Creative Experience*” oleh Mary Parker Follett (Follet, 1924); “*Industrial and Management*” oleh Henry Fayol (Henry Fayol dan Coubrough, 1930); “*Principles of Organization*” karya James D. Mooney dan Alan C. Riley (Money dan Riley, 1939) dan yang paling dikenal yaitu tujuh prinsip administrasi (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*)

dalam buku "*Paper on the Science of Administration*" karya Luchter H. Gulick dan Lyndall F. Urwick, (Gulick dan Urwick, 1937). Paradigma kedua ini fokusnya pada prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial dan budaya. (Astuti et al., n.d.)

C. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1050-1970)

Pada paradigma yang ketiga ini digambarkan oleh Henry sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam periode yang sama, ada beberapa peningkatan upaya dari ilmuwan manajemen yang mengklaim disiplin ilmu administrasi public menjadi bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ini menggambarkan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu, yang mengakibatkan itulah mengapa administrasi kembali untuk bertemu induknya ilmunya yaitu ilmu politik, sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan. (Astuti et al., n.d.)

D. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Pada paradigma ke empat ini Henry menetapkan bahwa periode ini sebagai kemenangan para ilmuwan administrasi negara untuk membawa administrasi publik bagian dari ilmu administrasi. Pada paradigma ketiga dan keempat ini, dua disiplin keilmuan yakni politik dan manajemen bersaing menempatkan diri paling berhak mengakui bagian keilmuan dari administrasi publik. (Astuti et al., n.d.)

E. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970an)

Pada paradigma kelima ini adalah administrasi negara yang menjadi titik fokus dan lokusnya sudah tergambar dengan jelas. Dalam paradigma ini fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya berfokus terhadap masalah-masalah dan kepentingan public. Perbedaan dari paradigma ini dengan sebelumnya adalah terdapat pada

kejelasan fokus dan lokusnya. Dalam paradigma ini tercermin perubahan administrasi negara menjadi administrasi publik. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)

F. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik Baru atau *Governance* (1997)

Pandangan dunia yang terakhir adalah "administrasi". Pemerintahan dicirikan sebagai aktivitas pemaksaan atau wewenang yang dilakukan oleh para pionir politik untuk memberikan bantuan pemerintah kepada masyarakat, mempunyai prosedur yang rumit yang melibatkan banyak kelompok sosial yang memegang kekuasaan, mengesahkan dan membubarkan pengaturan publik yang secara langsung mempengaruhi lembaga-lembaga, masyarakat, dan juga mempengaruhi kemajuan sosial dan ekonomi (Tamayao, 2014). Istilah Proses dijelaskan dengan istilah "tata kelola". prinsip-prinsip pemerintahan kontemporer berbeda dengan administrasi tradisional. Interaksi politik terlihat lebih luas ketika kelompok masyarakat dan warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting demi kepentingan publik (Ikeanyibe, 2016). Tata kelola memerlukan industri lain yang menguntungkan. moneter atau lainnya) untuk memberikan pelayanan, sedangkan otoritas publik hanya mengelola dan mengkoordinasikan. Secara umum, "pemerintahan" memerlukan ketundukan. administrasi (desentralisasi/berbagi kemampuan dan kapabilitas) kepada organisasi asosiasi non-manfaat, perusahaan milik swasta, dan ke tingkat pemerintahan lainnya (Ewalt, 2001). Pada dasarnya, "pemerintahan" melibatkan kemitraan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kolaborasi ini mencakup pelibatan sektor publik, organisasi kemasyarakatan, dan warga lokal serta swasta (Gibson, 2011). (Astuti et al., n.d.)

Penelitian ini menggunakan paradigma administrasi public ke-6 adalah pandangan dunia administrasi yaitu mengisi ulang pandangan dunia masa lalu. Dalam Kerangka pandangan dunia ini. Kekuasaan Umum Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sedikit demi sedikit berdampak pada negara kerangka dewan yang pada awalnya ditutup, tidak bertanggung jawab untuk

mengubah kerangka kerja eksekutif menjadi negara yang terbuka (terus terang) juga, bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan upaya otoritas publik untuk melakukan hal tersebut menyelesaikan pembenahan administrasi publik di bidang industri perjalanan khususnya bagi penduduk kota. Hal ini juga merupakan upaya untuk melindungi budaya unik daerah tersebut sebuah tempat.

Kemudian untuk mengatasi masalah menurunnya budaya yang hampir hilang/punah terutama budaya heritage Kota Lama Semarang, terbitlah sebuah gagasan untuk dilakukan pengembangan dan pencegahan melalui suatu kebijakan revitalisasi Kawasan cagar budaya secara merata. Cara tersebut juga termasuk ke dalam pengembangan pelayanan pemerintah kepada publik (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.).

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu cara, rencana dan rencana atau alat untuk memberikan kebutuhan masyarakat umum guna mencapai keadaan yang diinginkannya. Strategi publik merupakan standar yang dibingkai untuk kepentingan masyarakat umum atau daerah. Menggabungkan kepentingan bisnis dan kepentingan politik, orang atau perkumpulan tertentu. Dalam hal ini, strategi harus menerapkan standar partisipasi dan simpati terhadap masyarakat, baik dari sudut pandang formal, mental, dan harga diri. Strategi publik merupakan pilihan pemerintahan yang tidak dapat direbut kembali sehingga harus ditata dengan sungguh-sungguh. Pengaturan publik pada awalnya dan pada akhirnya adalah tentang kualitas Mendalam Pemerintah, bukan tentang isu-isu khusus dalam pendekatan pelaksanaan. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)

“Kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor dengan mempertimbangkan pemilihan tujuan dan sarana mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seharusnya, dalam prinsipnya, berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya” (Kebijakan

public adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau aktor politik mengenai pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu di mana pengambilan keputusan.

Pada prinsipnya, hal ini tetap berada dalam kewenangan para aktor untuk mencapainya). Pengertian di atas dapat diartikan bahwa kebijakan publik mengandung sejumlah keputusan yang saling berkaitan (tidak hanya satu keputusan tetapi banyak keputusan). dan tidak terpisah-pisah), tujuannya jelas termasuk sarana untuk mencapai tujuan tersebut Ini diciptakan untuk menanggapi masalah yang terjadi dalam suatu situasi oleh seorang aktor atau sejumlah aktor politik (eksekutif, legislative dan peradilan, termasuk aktor non-pemerintah). Menurut definisi hal ini jika dilihat dari aspek aktor yang terlibat yaitu aktor atau sejumlah aktor, mirip dengan apa yang diusulkan Anderson.

1.5.5 Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik memiliki peranan penting dalam mencapai keseluruhan dan komprehensif dari suatu kebijakan publik. Kebijakan publik atau program tersebut harus dijalankan agar memiliki dampak yang signifikan dan memberikan manfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah definisi Implementasi Kebijakan Publik menurut beberapa ahli:

1. Cleaves (dalam Waluyo,2017:49) mengartikan implementasi kebijakan sebagai proses langkah-langkah administratif dan politik (suatu proses menuju tujuan kebijakan melalui Langkah-langkah administratif dan politik).
2. Hamdi 2014:97) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merujuk pada Upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kebijakan tertentu.

3. Grindle (dalam Waluyo, 2017:49) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dalam realitasnya lebih berhubungan dengan konflik yang terkait dengan penentu siapa yang mendapatkan apa dari kebijakan, serta mekanisme bagaimana Keputusan kebijakan dijalankan melalui prosedur rutin melalui jalur birokrasi.
4. Mulyadi (2015:26) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai transformasi lintas organisasi, Dimana perubahan diimplementasikan melalui strategi implementasi kebijakan yang menghubungkan berbagai lapisan Masyarakat.

Studi implementasi kebijakan hakikatnya memiliki tujuan pokok dalam menjelaskan berbagai fenomena implementasi kebijakan. Fenomena implementasi kebijakan mampu menghasilkan capaian implementasi yang berbeda, bisa dikatakan kegagalan atau keberhasilan dari suatu kebijakan. Hal tersebut dapat dikonseptualisasi sebagai kinerja kebijakan. Konsep kinerja kebijakan juga erat kaitannya dengan evaluasi kebijakan, yang bermakna sebagai evaluasi kebijakan implementasi kebijakan dan/atau evaluasi hasil kebijakan (Riant Nugroho, 2017:93). Pada intinya, kinerja kebijakan merupakan Gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan program maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, sehingga kinerja kebijakan dinilai sangat krusial karena mampu menggambarkan Tingkat pencapaian implementasi sehingga muncul penilaian (*judgement*) terhadap hasil kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Secara metodologis, kinerja kebijakan akan menghasilkan suatu hubungan sebab akibat terkait hasil dengan berbagai faktor pada proses implementasi sehingga menyebabkan tinggi atau rendah kinerja. Penilaian terhadap kinerja dipakai peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu: (i) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan, (ii) apa tahapan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, (iii) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan akan mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak. Kerangka pikir yang

dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi suatu kebijakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

"Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan," kata Thomas R. Dye pada tahun 1992. Dye berpendapat bahwa karena kebijakan publik adalah "aktivitas" pemerintah, setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki tujuan dan sasaran. Jika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan tindakan tertentu, itu adalah kebijakan publik, dan harus ada alasan untuk itu. Pernyataan "Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah" dibuat oleh James E. Anderson pada tahun 1970. Anggara (2014). Menurut Edwards III, ada empat elemen yang berfungsi sebagai penanda tolak ukur pencapaian;

1) Komunikasi yang efektif sangat penting untuk pengambilan keputusan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik (Bima Bayu Aji, t.t.). Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, suatu proses komunikasi harus ditetapkan. Tiga teknik digunakan sebagai metrik untuk menilai efektivitas komunikasi:

- a) Transmisi, Keluaran yang baik juga dapat dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Kejadian yang paling umum adalah miskomunikasi antara dua orang.
- b) Kejelasan, Para pembuat kebijakan (kantor jalanan) harus menerima sinyal yang jelas dan tidak menipu; implementasi tidak perlu selalu terhambat oleh pesan politik yang ambigu. Pada tingkat tertentu, para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan menginginkan fleksibilitas dalam cara kebijakan diimplementasikan.
- c) Konsistensi, Agar arahan komunikasi dapat ditulis atau dilaksanakan, arahan tersebut harus jelas dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perintah sering diubah untuk membingungkan orang yang hadir.

2) SDM. sumber daya material, keuangan, dan manusia digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Ini tentang para peserta, termasuk kekuatan, kuantitas, dan kualitas mereka. Jadi, dalam hal ini, sumber daya adalah faktornya penting lainnya untuk penegakan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa berikut ini adalah tanda-tanda keberhasilan sumber daya:

- a) Staf, Manusia adalah sumber daya utama untuk menerapkan kebijakan. Adanya personel yang tidak kompeten di bidang terkait merupakan kesalahan yang sering terjadi dalam penegakan kebijakan.
- b) Informasi, yang dipisahkan menjadi dua bagian selama pelaksanaan kebijakan: pertama, informasi tentang cara melaksanakan kebijakan. Setelah menerima perintah, kontraktor harus tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah data tentang kepatuhan yang diperoleh dari petugas kepatuhan dan peraturan pemerintah. Apakah orang yang terlibat dalam penegakan kebijakan mematuhi hukum harus dikomunikasikan kepada penegak hukum.
- c) Otoritas Secara umum, untuk melaksanakan arahan, otoritas harus formal. Orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang diputuskan secara politis dikenal sebagai otoritas. Ketika kekuasaan nol, publik tidak membenarkan penggunaan otoritas, yang mungkin membuat lebih sulit untuk menerapkan kebijakan.
- d) Fasilitas Salah satu penanda utama seberapa baik kebijakan sedang dilaksanakan adalah kemudahan. Penegak hukum dapat diberi wewenang untuk memiliki cukup karyawan, memahami tugas yang ada, dan melakukan pekerjaan mereka. Kebijakan tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh infrastruktur.

3) Disposisi adalah pola pikir dan kesiapan individu dalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan dengan sukses Implementasinya tidak memihak. Terkait variabel pelepasan, beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Regulasi Birokrasi Dalam hal ini, Edwards III mengamanatkan agar penerapan kebijakan juga dipertimbangkan dari sudut pandang regulasi yang signifikan. Penunjukan pejabat pemerintah pada lembaga operasional memerlukan perpaduan antara keterampilan, bakat, dan keberanian.
- b) Edward menyatakan bahwa manipulasi persuasi merupakan salah satu strategi yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan penegakan hukum. Oleh karena itu, orang seringkali berperilaku demi kepentingan terbaik mereka sendiri, mempengaruhi insentif para pembuat keputusan untuk mempengaruhi perilaku mereka yang bertugas melaksanakan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi adalah tempat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Suatu kebijakan mungkin tidak diimplementasikan karena kurangnya struktur administratif, bahkan jika Anda memiliki sumber daya untuk melakukannya atau para pembuat kebijakan tahu apa yang harus dilakukan untuk ingin mengimplementasikan suatu kebijakan. Dua sifat, menurut Edward III, dapat meningkatkan kinerja dalam suatu struktur organisasi:

- a) Melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan SOP yang diperlukan.
- b) Fragmentasi merupakan suatu teknik untuk mengalokasikan akuntabilitas atas aktivitas karyawan ke banyak unit kerja.

Cole dan Parston (2006:21) menjelaskan bahwa untuk menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu yang penting. Tercapainya tujuan suatu kebijakan akan melalui tahapan yang cukup panjang.

Tahapan tersebut dimulai dari adanya: (i) input kebijakan (sumber daya) yang dipakai untuk menghasilkan produk dan layanan dari suatu program, (ii) proses atau kegiatan (kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik), dan keluaran (*output*) kebijakan berupa produk dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran, (iii) dampak langsung, (iv) dampak jangka menengah, (v) dampak jangka panjang yang dirasakan oleh kelompok sasaran program kebijakan.

Berdasarkan penjabaran diatas, implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai tahap Dimana pemerintah mengambil suatu Tindakan atau Keputusan dengan menjalankan sebuah kegiatan yang memiliki dampak bagi public. Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan menjelaskan situasi dan kondisi tertentu setelah suatu kebijakan tercipta. Hal tersebut disebut dengan model implementasi kebijakan.

1.5.6 Implementasi Program

Implementasi merupakan Bahasa serapan dari bahasa inggris yang berasal dari kata “*to implement*” yang artinya mengimplementasikan. Implementasi menjadi beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2005:70) menjelaskan definisinya terkait implementasi bahwa implementasi merupakan suatu muara pada aktivitas, aksi, Tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem kegiatan atau aksi yang terencana, terstruktur, serta dengan tujuan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah harsono (2007:267), berpendapat bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi Tindakan kebijakan dari politik administrasi, sedangkan menurut Guntur Setiawan (2009:39), berpendapat bahwa implementasi yaitu sebuah perluasan aktivitas dengan saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan kebijakan untuk mencapai hasil dan proses pelaksanaan dan memerlukan adanya unsur

pelaksana. Menurut Syukur dalam Sumaryadi (2005:79) menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam implementasi, yaitu:

1. Terdapat program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Adanya sasaran kelompok (*target group*) adalah suatu kelompok Masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program atau kebijakan yang dilaksanakan.
3. Unsur pelaksana baik itu organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam memperoleh hasil dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan penjabaran menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sesuatu serangkaian aktifitas atau aksi dari tujuan kebijakan yang ditujukan kepada Masyarakat dengan melibatkan pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan pendapat Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023:44), bahwa dalam implementasi terdapat beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi organisasi, implementor dalam menyelenggarakan implementasi program harus mempunyai tugas pokok serta fungsi yang jelas tentang tujuan implementasi dan suatu program yang akan dicapai. Implementor juga harus mempunyai struktur organisasi serta visi misi yang telah sesuai dengan program. Kejelasan dari struktur organisasi pelaksana diperlukan dalam pengoperasian program supaya dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki oleh program tersebut. Dalam dimensi ini, dicirikan menjadi tiga kategori oleh Wahab (dalam Nurhayati, 2013:30) adalah sebagai berikut:
 - a. *A hierarchical structure involving delegations of authority from the top to the bottom of organization*, yang hal tersebut memiliki pengertian bahwasanya organisasi memiliki

keterkaitan yang sangat erat dengan eksistensi hierarki yang sejalan dengan adanya aliran wewenang dari arah atas ke bawah berdasarkan struktur organisasi.

- b. *A series of official positions or offices, each having prescribed duties and responsibilities*, memiliki makna organisasi berkaitan pengisian jabatan beserta dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- c. *Formal rules, regulations and standard governing operations of the organization and behaviour of its member*, mempunyai pengertian bahwa organisasi memiliki keterkaitan dengan baik itu peraturan atau SOP yang telah dipatenkan menjadi aspek dalam mengatur sistem kerja dan perilaku para anggota.
- d. *Technically qualified personal employed on career basis with promotion based on qualifications and performance*, mempunyai makna bahwa organisasi berkaitan dengan SDM yang menjadi penggerak organisasi berdasarkan kualitas tertentu.

Penataan ulang sumber daya organisasi, kejelasan prosedur, dan wewenang yang cukup menjadi suatu aspek-aspek yang penting untuk diimplementasikan baik agar mampu untuk menghilangkan terhadap adanya ketimpang tindihan dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam secara organisasi.

- 2. Dimensi interpretasi, menurut Saefullah (dalam Natari et al., 2018:14) menjelaskan bahwa implementor melaksanakan program sebagaimana harapan dan tujuan yang telah direncanakan terhadap keberjalanan program yang sedang diupayakan dengan melibatkan semua pihak yang berperan dalam implementasi program. Pendapat diatas menunjukkan bahwa masih ditemukan ada ketidaksepahaman antara implementasi dengan penerima manfaat program hingga sulit untuk terwujud. Charles O. Jones juga mengemukakan pendapatnya yang mampu memunculkan terkait interpretasi yang berbeda, yaitu berbagai

hal yang mudah dikendalikan, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang yang mampu memberikan dampak pada pelaksana. Yang berkaitan dengan mudah dikendalikan terkait dengan faktor tingkah laku kelompok, ukuran kelompok, dan perubahan tingkah laku kelompok sedangkan yang berkaitan dengan undang-undang terkait dengan faktor tujuan yang konsisten, ketentuan peraturan, dana yang cukup, dan komitmen pelaksana.

3. Dimensi aplikasi (penerapan), menurut pendapat Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023:44) dimensi ini bergantung pada kemampuan implementor dalam melaksanakan program secara aplikatif di lapangan atau kepada masyarakat melalui perwujudan pelayanan, pembayaran, kemudahan, serta pengawasan. Dimensi aplikasi ini juga dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan program tidak bersinggungan atau berbenturan dengan pelaksanaan program lain. Dalam dimensi ini ada penilaian yang terdiri atas keberhasilan program, prinsip kualitas, pengawasan terhadap program, dan evaluasi.

Pada dasarnya implementasi adalah kegiatan untuk melakukan pendistribusian keluaran program atau kebijakan yang dilakukan implementor kepada sasaran target. Penilaian kinerja implementasi dapat dinilai oleh masyarakat yang di masa akan datang menjadi tolak ukur bagi kebijakan atau program selanjutnya. Dalam penilaian kinerja implementasi terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan implementasi program. Menurut Mahsun (2009, dalam Masana Sembiring, 2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Input, kriteria ini dilaksanakan pra-perencanaan melalui perencanaan. Sumber daya yang dapat mencakup pendanaan, SDM, dan sumber daya fisik. Kriteria ini berperan penting dalam penilaian kinerja implementasi program sebab bagaimana kondisi yang disediakan dan apakah sudah sesuai untuk mencapai tujuan program.

- b. Proses, kegiatan yang terlibat suatu program mulai aksi perencanaan, koordinasi, hingga pemantauan. Kriteria ini sama pentingnya juga dengan kriteria input apakah program telah dieksekusi sesuai dengan rencana dan bagaimana prosesnya dalam mencapai tujuan dari program.
- c. *Output*, merupakan kriteria terakhir yang dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan program.

Policy output digunakan untuk mengetahui yang dirasakan oleh kelompok sasaran secara langsung akibat dari adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hadiah, dan subsidi dari implementasi kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas *policy output* dari implementasi program, dapat dilihat berdasarkan lima aspek penting menurut Cole, Martin, dan Parston (dalam Purwanto, 2015) adalah:

1. Akses, memiliki pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi seluruh kelompok sasaran dan tidak terjadinya diskriminasi dalam terlibat dan menikmati manfaat dari program tersebut.
2. Cakupan, dalam menelaah seberapa besar kelompok sasaran yang dapat dijangkau dengan adanya program tersebut.
3. Ketepatan layanan, memiliki nilai dan peran penting dalam implementasi program dalam menilai pelayanan yang diberikan dengan program tersebut sesuai dengan tujuan program.
4. Akuntabilitas, digunakan sebagai acuan nilai terhadap pelaksana kebijakan pelaksanaan tugasnya kepada kelompok sasaran dapat dalam dipertanggungjawabkan atau tidak.
5. Kesesuaian program dengan kebutuhan, kriteria ini digunakan untuk mencermati dan menelaah terkait keluaran dari program yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran telah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

1.5.7 Kebijakan Revitalisasi

Regenerasi atau revitalisasi adalah proses revitalisasi. Kebangkitan dalam arti sebenarnya mengandung makna menghidupkan kembali sesuatu, artinya tidak sekedar membuat atau mengembalikan apa yang telah ada sebelumnya, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai struktur dan mekanisme operasinya, serta variasinya. Revitalisasi suatu kawasan meliputi langkah-langkah berikut: peningkatan aspek sosial, ekonomi, dan fisik. Salah satu definisi pembangunan kembali adalah pembaharuan atau pemberian energi dan penghidupan kembali.

Secara harfiah, revitalisasi berarti mengembalikan atau menghidupkan kembali bentuk-bentuk eksistensi lama, namun juga menyempurnakan konstruksi, sistem kerja, dan transformasi ke arah yang baru. Sesuai dengan Peraturan Nomor 18 tentang Pedoman Rehabilitasi Daerah Tahun 2010. Revitalisasi adalah upaya untuk memperluas nilai suatu tanah/wilayah melalui pembangunan kembali suatu wilayah yang dapat memanfaatkan kemampuan wilayah yang telah ada. Dapat dikatakan bahwa revitalisasi itu sendiri tidak terbatas pada keindahan fisik secara keseluruhan, namun harus dilengkapi dengan penyempurnaan, pengenalan budaya dan ekonomi. Peremajaan berfungsi sebagai latihan yang kompleks (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.).

a. Perawatan Fisik

Kondisi visual atau fisik suatu area berkaitan dengan gambaran area tersebut. Jika ingin menarik wisatawan atau pengunjung, maka kajian ini mutlak diperlukan (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.).

b. Pemukiman Kembali Ekonomi

Peningkatan fisik akan meningkatkan aktivitas perekonomian secara keseluruhan. baik formal maupun informal untuk menambah nilai kawasan tersebut (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.).

c. Revitalisasi Masyarakat

Kegiatan yang bertujuan untuk revitalisasi akan berhasil jika mampu mengubah suasana dan menarik, sehingga tidak hanya menambah keindahan tetapi juga bermanfaat bagi kegiatan sosial di lingkungan sekitar (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.).

1.5.8 Cultural Heritage

Warisan budaya disebut juga warisan budaya, menurut UNESCO, Warisan budaya meliputi warisan budaya yang berwujud (*Tangible Cultural Heritage*) dan warisan budaya takbenda (*Intangible Cultural Warisan*). Warisan budaya nyata yang nyata dapat berupa: 1) warisan budaya bergerak (lukisan, patung, uang logam, naskah kuno), 2) harta warisan budaya (monumen, situs arkeologi), 3) warisan budaya bawah laut (bangkai kapal kapal, situs bawah air dan monumen). Sedangkan untuk warisan budaya takbenda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukan, dan ritual. Menurut Konvensi Warisan Kebudayaan UNESCO pada tahun 2003, warisan budaya mengacu pada jenis praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan yang diakui dan diakui oleh berbagai komunitas dan kelompok, dan dalam beberapa kasus merupakan bagian dari warisan budaya. Dalam kaitannya dengan warisan budaya, yang dimaksud dengan warisan budaya adalah warisan budaya tentang ciri-ciri dan nilai-nilai estetika, sejarah, sosial, spiritual atau nilai-nilai lain dari suatu benda tempat, benda atau adat istiadat yang dapat dilestarikan secara turun temurun segera(Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)

1.5.9 Revitalisasi Wisata Budaya

Menghidupkan kembali pariwisata budaya adalah sebuah proses pertumbuhan dan pemulihan. Pariwisata re-destinasi yang mengedepankan kekayaan warisan dan ciri khas budaya suatu daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi dan pelestarian

budaya, serta memberikan manfaat moneter dan sosial bagi masyarakat luas. Langkah berikutnya adalah meremajakan industri perjalanan sosial:

1. **Identifikasi dan Pelestarian Warisan Budaya:** Langkah awal adalah membedakan sumber daya sosial yang ada di suatu tempat dan menjaganya. Ini mungkin mencakup destinasi arkeologi, landmark yang dapat diverifikasi, praktik sosial, tarian, musik, karya seni, atau kenikmatan kuliner yang luar biasa. Pelestarian warisan budaya dengan baik merupakan alasan penting bagi kebangkitan industri perjalanan sosial. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)
2. **Penyusunan Rencana Pengelolaan:** Terbentuknya rencana administrasi yang terarah dan berkesinambungan. Strategi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti dukungan lokasi, peningkatan infrastruktur, promosi, regulasi, dan partisipasi masyarakat lokal. Pengalaman wisata yang komprehensif adalah tujuannya dan tahan lama. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)
3. **Penguatan Kelompok Masyarakat Sekitar:** Melibatkan dan Melibatkan Revitalisasi wisata budaya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal. Komunitas harus terlibat dalam navigasi, pelatihan, kemampuan kemajuan, dan mendapatkan keuntungan finansial dari bidang industri perjalanan. Hal ini akan meningkatkan ikatan antar wisatawan dan jaringan terdekat serta meningkatkan pengalaman industri perjalanan sosial. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)
4. **Pengajaran dan Perhatian Sosial:** Pendidikan dan perhatian sosial merupakan komponen penting dalam peremajaan sosial industri perjalanan. Masyarakat Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya konservasi. warisan mereka, berbagi pengetahuan, dan menghormati budaya mereka dengan wisatawan. Kegiatan, pelatihan, dan

program pendidikan Untuk mencapai hal ini, kesadaran budaya dapat dipertahankan (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.).

5. Kemajuan Barang dan Pengalaman Industri Perjalanan: Peningkatan hasil dan pengalaman pariwisata yang orisinal dan khas penting dalam kebangkitan pariwisata budaya. Wisata budaya, perayaan tradisional, ekspresi pengalihan perhatian, kelas kreasi, atau perjumpaan kuliner. Memperkaya Penawaran industri perjalanan dengan komponen sosial akan lebih menarik bagi wisatawan yang tertarik dengan berbagai pertemuan. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)
6. Promosi dan Pemasaran: Upaya promosi dan pemasaran yang tepat harus dilakukan untuk mengakomodasi keberatan sosial industri perjalanan dengan masyarakat umum yang lebih luas. Hal ini dapat mencakup sistem yang canggih, upaya terkoordinasi dengan kemitraan dengan spesialis, perjalanan, partisipasi dalam pameran pariwisata, atau media internasional dan lokal. Promosi yang berhasil dapat menciptakan minat terhadap wisata budaya dan kesadaran akan hal tersebut. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)

Social Asset Board (CRM) adalah aset yang dimanfaatkan para eksekutif oleh banyak pihak dari budaya sadar keberagaman. Hindari konflik. Kegiatan reklamasi tidak hanya terfokus pada pembangunan struktur yang sebenarnya, namun juga memasukkan pemandangan sebagai bagian penting dari struktur tersebut, selain menjaga dan memelihara kelestarian bangunan, namun juga pembangunan dan penerapannya.

Kegiatan pembangunan kembali warisan sosial tidak hanya berfokus pada pembangunan pembangunan yang nyata namun juga memasukkan pemandangan sebagai bagian penting dari bangunan, dengan tujuan tidak hanya untuk melindungi dan menjaga kelestarian bangunan, namun juga merusak dan berkembang wisata. (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.)

1.5.10 Faktor Pendukung

Dalam hal tersebut terdapat faktor pendukung Program revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang sebagai berikut:

1. Terdapat keinginan dari *stakeholders* terkait untuk melakukan perbaikan Kawasan wisata budaya
2. Sesuai dengan menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan secara teknis diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama
3. Terdapat keinginan dari masyarakat kota semarang dan pengunjung Kota Lama Semarang untuk melestarikan Wisata Kota Lama
4. Terdapat dukungan dari pemerintah kota melalui Peraturan Gubernur
5. Kondisi Kawasan Kota Lama yang masih kurang terawat sehingga dapat menjadi acuan untuk melakukan revitalisasi

1.5.11 Faktor Penghambat

Dalam hal tersebut terdapat penghambat Program revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang sebagai berikut:

1. Kondisi bangunan yang sudah direnovasi dan menghilangkan keaslian bangunan oleh penyewa
2. Proses pelaksanaan yang terhambat dan tertunda
3. Tidak terdapat transparansi terkait informasi hasil dari revitalisasi
4. Kondisi bangunan yang mulai hancur dan tidak terawat

1.6 Argumen Penelitian

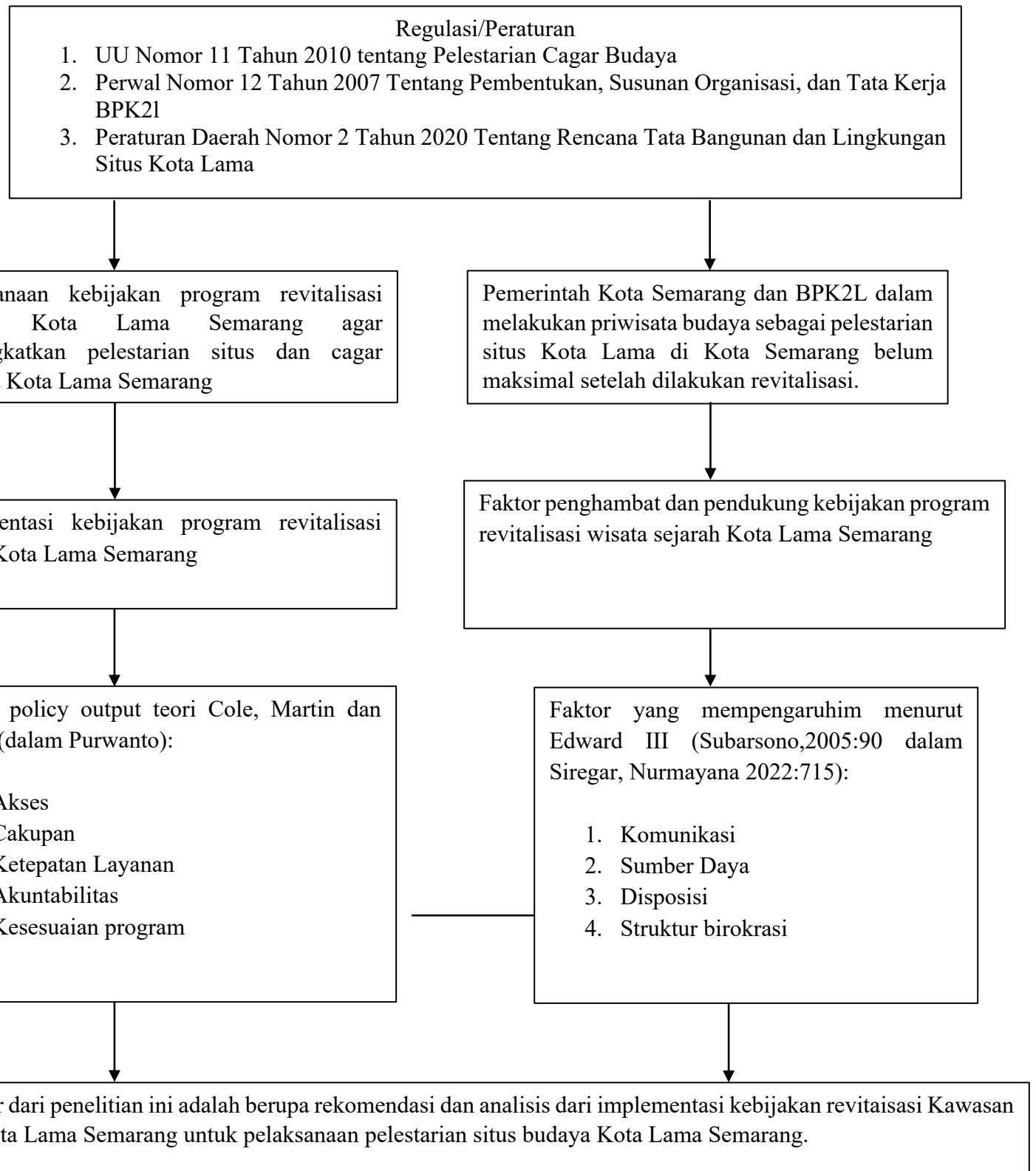
Proses revitalisasi suatu objek sebenarnya adalah revitalisasi daya tarik wisata. Pariwisata belum berada pada kondisi terbaiknya. Revitalisasi tidak hanya bersifat spesifik pada pembangunan atau pemeliharaan struktur atau infrastruktur obyek Pariwisata, namun juga berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, branding tempat, dan pemeliharaan, serius, siap mengimbangi keadaan normal dan sosial yang ada melalui UMKM dan cagar alam, mempromosikan pariwisata dan memberi masyarakat lokal lebih banyak kekuatan budaya (Alya Nadhifah Yasmin et al., n.d.). Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang mulai dikerjakan pada tahun 2017 dengan dukungan dari pemerintah pusat yang melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang membantu Walikota Semarang untuk mendorong adanya perubahan di Kawasan yang memiliki banyak nilai sejarah.

Revitalisasi dengan disertai memanfaatkan berbagai Gedung-gedung tua di Kawasan Kota Lama Semarang diubah menjadi Kawasan ekonomi dan bisnis. Dalam pemanfaatan Gedung-gedung tersebut dapat dijadikan sebagai perkantoran, restoran, cafe, bahkan dapat menjadi tempat wisata yang tidak kumuh dan rawan terhadap kriminalitas. Kemudian bangunan lain juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk sebagai galeri seni dan dapat dijadikan untuk pameran produk UMKM, untuk mempromosikan potensi UMKM yang ada di Kota Semarang terhadap masyarakat dan pengunjung Kota Lama Semarang. (Aji & Subowo2, n.d.)

SK Walikota Semarang Nomor 6/50/1992 tentang Pelestarian Bangunan Tua/Bersejarah Di Kawasan Kota Lama Semarang, UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992). Sejak saat itu Kota Semarang mulai bertindak melestarikan bangunan bersejarah dengan menyusun daftar bangunan yang termasuk dalam bangunan cagar budaya. Dengan berlakunya undang-undang tentang Pelestarian Benda Cagar Budaya, undang-

undang tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010) (Alya Putri et al., n.d.)

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Policy Output

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi program sebagai penuntun dan alur berpikir dalam menyelesaikan penelitian ini.

Policy output digunakan untuk mengetahui yang dirasakan oleh kelompok sasaran secara langsung akibat dari adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hadiah, dan subsidi dari implementasi kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas *policy output* dari implementasi program, dapat dilihat berdasarkan lima aspek penting yaitu:

- a. Akses
 - a) Kemudahan untuk kelompok sasaran dalam menerima program revitalisasi Kota Lama .
 - b) Kenyamanan untuk kelompok sasaran menerima program revitalisasi Kota Lama.
 - c) Kesempatan yang sama untuk kelompok sasaran menerima program revitalisasi Kota Lama.
- b. Cakupan
 - a) Kelompok sasaran yang menjadi cakupan dalam program revitalisasi Kota Lama Semarang.
- c. Ketepatan Layanan
 - a) Ketepatan dan efektifitas waktu dalam pelaksanaan program revitalisasi Kota Lama Semarang.
 - b) Keberhasilan program pemerintah melestarikan cagar budaya.
- d. Akuntabilitas
 - a) Integritas pegawai dalam pelaksanaan program revitalisasi Kota Lama.

- b) Transparansi dalam memberikan pelayanan.
- e. Kesesuaian program dengan kebutuhan
 - a) Ketepatan dan keterkaitan antara program dengan kebutuhan Masyarakat.

1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat empat elemen yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan penghambat pencapaian;

1. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk pengambilan keputusan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik (Bima Bayu Aji, t.t.). Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, suatu proses komunikasi harus ditetapkan. Tiga teknik digunakan sebagai metrik untuk menilai efektivitas komunikasi:
 - a. Transmisi, Keluaran yang baik juga dapat dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Kejadian yang paling umum adalah miskomunikasi antara dua orang.
 - b. Kejelasan, Para pembuat kebijakan (kantor jalanan) harus menerima sinyal yang jelas dan tidak menipu; implementasi tidak perlu selalu terhambat oleh pesan politik yang ambigu. Pada tingkat tertentu, para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan menginginkan fleksibilitas dalam cara kebijakan diimplementasikan.
 - c. Konsistensi, Agar arahan komunikasi dapat ditulis atau dilaksanakan, arahan tersebut harus jelas dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perintah sering diubah untuk membingungkan orang yang hadir.
2. SDM. sumber daya material, keuangan, dan manusia digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Ini tentang para peserta, termasuk kekuatan, kuantitas, dan kualitas mereka. Jadi, dalam hal ini, sumber daya adalah faktornya penting lainnya untuk penegakan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa berikut ini adalah tanda-tanda keberhasilan sumber daya:

- a. Staf, Manusia adalah sumber daya utama untuk menerapkan kebijakan. Adanya personel yang tidak kompeten di bidang terkait merupakan kesalahan yang sering terjadi dalam penegakan kebijakan.
 - b. Informasi, yang dipisahkan menjadi dua bagian selama pelaksanaan kebijakan: pertama, informasi tentang cara melaksanakan kebijakan. Setelah menerima perintah, kontraktor harus tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah data tentang kepatuhan yang diperoleh dari petugas kepatuhan dan peraturan pemerintah. Apakah orang yang terlibat dalam penegakan kebijakan mematuhi hukum harus dikomunikasikan kepada penegak hukum.
 - c. Otoritas Secara umum, untuk melaksanakan arahan, otoritas harus formal. Orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang diputuskan secara politis dikenal sebagai otoritas. Ketika kekuasaan nol, publik tidak membenarkan penggunaan otoritas, yang mungkin membuat lebih sulit untuk menerapkan kebijakan.
 - d. Fasilitas Salah satu penanda utama seberapa baik kebijakan sedang dilaksanakan adalah kemudahan. Penegak hukum dapat diberi wewenang untuk memiliki cukup karyawan, memahami tugas yang ada, dan melakukan pekerjaan mereka. Kebijakan tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh infrastruktur.
3. Disposisi adalah pola pikir dan kesiapan individu dalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan dengan sukses Implementasinya tidak memihak. Terkait variabel pelepasan, beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah:
- a. Regulasi Birokrasi Dalam hal ini, Edwards III mengamanatkan agar penerapan kebijakan juga dipertimbangkan dari sudut pandang regulasi yang signifikan. Penunjukan pejabat

pemerintah pada lembaga operasional memerlukan perpaduan antara keterampilan, bakat, dan keberanian.

- b. Edward menyatakan bahwa manipulasi persuasi merupakan salah satu strategi yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan penegakan hukum. Oleh karena itu, orang seringkali berperilaku demi kepentingan terbaik mereka sendiri, mempengaruhi insentif para pembuat keputusan untuk mempengaruhi perilaku mereka yang bertugas melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi adalah tempat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Suatu kebijakan mungkin tidak diimplementasikan karena kurangnya struktur administratif, bahkan jika Anda memiliki sumber daya untuk melakukannya atau para pembuat kebijakan tahu apa yang harus dilakukan untuk ingin mengimplementasikan suatu kebijakan. Dua sifat, menurut Edward III, dapat meningkatkan kinerja dalam suatu struktur organisasi:
- a. Melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan SOP yang diperlukan.
 - b. Fragmentasi merupakan suatu teknik untuk mengalokasikan akuntabilitas atas aktivitas karyawan ke banyak unit kerja.

1.9 Metode Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilalui peneliti untuk memperoleh informasi berupa data berdasarkan hasil suatu penelitian. Tujuan dari pendekatan penelitian adalah memperoleh informasi atau pengungkapan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ada dua jenis metode penelitian: penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas. gambaran jelas. Penggunaan data ditekankan pada metode kuantitatif. berupa angka-

angka dan tata cara penelitian terhadap hasil pengukuran objektif dengan menggunakan pemeriksaan terukur.

1.9.1 Tipe Penelitian

Suatu metode yang dikenal dengan metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hasil penelitiannya pada waktu yang pasti (Mukhtar, 2013:10). Sesuai dengan pemeriksaan semacam ini, untuk bersifat subjektif tertentu, data yang diperoleh kemudian disajikan bersifat deskriptif, sehingga menyederhanakan pengelolaan data wawancara oleh peneliti dan observasi untuk mengamati langsung kenyataan sebenarnya di lapangan.

1.5.8 Lokus dan Fokus Penelitian

Pemilihan lokus penelitian menentukan wilayah atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dalam konteks penelitian ini Mengingat pentingnya situasi penelitian atau keaslian fenomena, maka dilakukan di lokasi sebenarnya, dan manipulasi harus benar-benar dihindari. latar belakang penelitian Lokasi yang dipilih peneliti untuk penelitian ini Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Semarang yang digunakan untuk penelitian, Hasil revitalisasi mempengaruhi pemilihan latar belakang penelitian. sebuah area yang tidak berubah dan saat ini terbuka untuk umum. Sedangkan implementasi merupakan fokus utama penelitian yang dibahas. kebijakan revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang dengan melihat aspek pelestarian situs Kota Lama Semarang. Untuk menguji efisiensi kebijakan revitalisasi yang dilaksanakan dalam hal keberhasilan kebijakan, kelayakan budaya, dan rekomendasi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pengambilan sampel dengan tujuan digunakan untuk memilih subjek penelitian. pilihan untuk memilih apakah informan ingin menjadi subjek atau sampel penelitian. Sehubungan dengan pemeriksaan ini, subjek dibandingkan dengan Kriteria penelitian:

1. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman PUPR
2. Staff Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman PUPR
3. Kepala Bidang Kepariwisata Disbudpar
4. Seksi Pengawasan Kepariwisata Disbudpar
5. Kepala Bidang Tata Ruang Distaru
6. Masyarakat sekitar kawasan Kota lama
7. Wisatawan Kota Lama
8. Wisatawan Kota Lama

1.9.4 Jenis Data

Data sekunder dan data primer merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan secara acak merupakan sumber data penelitian. secara tidak langsung melalui perantara atau pihak lain yang mengumpulkan dan mencatat data. Catatan sejarah, laporan, dan bentuk data sekunder lainnya sering kali ada. dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang tersimpan di arsip (Indriantoro & Supomo, 1999). Selain itu, wawancara, kata-kata, dan teks digunakan sebagai sumber data. terdiri dari kata-kata, ungkapan atau gambar yang dapat menggambarkan individu dalam penelitian, tindakan terkait penelitian, dan fenomena yang terjadi selama pemeriksaan.

1.9.5 Sumber Data

Hardani dkk. (2020) dan Zuldafrial (2012) merupakan subjek yang datanya dapat diperoleh. Sementara itu, Sugiyono (2009) menyatakan bahwa jika dikaji, baik sumber data primer maupun sekunder mempunyai potensi untuk digunakan dalam pengumpulan data. Sumber informasi esensial adalah sumber informasi yang memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung. langsung ke sumber datanya. Sumber informasi mendasar yang dibutuhkan ilmuwan berasal dari saksi pengunjung destinasi wisata dan penanggung jawab melakukan pengaturan penyembuhan. Sebaliknya, catatan dan dokumen lain, seperti artikel atau ulasan penelitian sebelumnya, berfungsi sebagai sumber data sekunder. isu-isu terkait yang dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang mengarahkan administrasi publik secara elektronik.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009) juga memaknai bahwa dalam pemeriksaan subjektif pengumpulan data berlangsung secara alamiah dan dalam keadaan alamiah. memperoleh hasil senormal yang diharapkan, memanfaatkan sumber informasi penting, dan Observasi adalah metode pengumpulan data yang paling umum. dokumentasi, wawancara, dan studi literatur Peneliti dalam penelitian ini menggunakan menggunakan empat metode penelitian yang berbeda, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2008) adalah pengumpulan dua individu dengan tujuan pertukaran informasi dan gagasan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik yang diinginkan. Melalui tanggapan yang diberikan, peneliti mempunyai pengetahuan pertanyaan yang komprehensif. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu ilmuwan dengan narasumber

atau responden untuk mendapatkan data dan konsep melalui tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian. Pada wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini dilakukan secara lebih terbuka dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan, selain itu narasumber juga ditanyai mengenai pemikiran dan gagasannya. Terkait dengan pertumbuhan kawasan cagar budaya Setu Babakan Agar sungguh menakjubkan. Untuk situasi seperti ini rapat yang dipimpin akan sangat memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan tidak terstruktur. terbuka, memungkinkan tanggapan dan pendapat terbuka dari sumber individu.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, dimana dilakukan teknik wawancara secara langsung (*face to face* interview) bersama Kepala pengurus kawasan Kota Lama Semarang mengenai keberlangsungan proses wisata dan revitalisasi Kota Lama Semarang.

2. Observasi

Sugiyono (2014) mengatakan observasi adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologi yang kompleks. Strategi persepsi ini ada beberapa macamnya, berikut metode observasi yang digunakan:

- a. Observasi yang dilakukan oleh non-partisipan dianggap non-partisipan apabila pengamat tersebut bukan merupakan bagian dari kehidupan pengamat atau individu yang diawasi.
- b. Observasi terstruktur disebut juga observasi sistematis dengan cara mengamati dan mengamati.
- c. Pengamat yang melakukan pengamatan eksperimental memasuki keadaan atau situasi tertentu. Peneliti tertarik untuk mengamati langsung pelaksanaannya. Revitalisasi dapat menjadi hal yang menarik dan mempunyai dampak langsung terhadap keberlanjutan wisatawan. Observasi atau pengamatan dilakukan selama penelitian ini. dengan menggunakan

observasi sistematis dan partisipatif. dimana peneliti ikut serta dalam observasi dan berpartisipasi dengan menggunakan pedoman sebagai alat observasinya.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa masa lalu disebut dokumentasi. Dokumen ini dapat berbentuk gambar atau ditulis oleh perorangan. biasanya disebut sebagai "dokumentasi yang berjalan". Dokumentasi data yang diperoleh dari wawancara dapat digabungkan. menjadi data yang dapat diandalkan. Dalam eksplorasi ini dokumentasi yang ada di kawasan akan digunakan pada saat melakukan wawancara dan observasi di Kawasan Kota Lama Semarang.

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang mana penulis menggunakan berbagai sumber untuk mencari data dan informasi. dokumen dalam bentuk tertulis, elektronik, dan cetak untuk membantu proses penulisan artikel. Bahan bacaan merupakan salah satu cara mempelajari sastra. dari buku-buku tambahan yang memberikan dukungan teoritis terhadap pokok bahasan yang dibahas seperti yang dijelaskan dalam tesis, tesis, dan sumber lain seperti jurnal, sumber web substansial lainnya. Dalam kebanyakan kasus, peneliti memperoleh informasi yang diperoleh dari penyelidikan masa lalu yang berbeda yang memiliki subjek terkait, setelah itu analisis dan kesimpulan diambil. *Purposive sampling* digunakan peneliti untuk menentukan sampel. Metode *purposive sampling* merupakan cara pemilihan sampel dengan menentukan beberapa kriteria sehingga menghasilkan sampel yang layak secara logika dianggap mewakili masyarakat luas.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Proses pengorganisasian data dengan benar dikenal sebagai analisis data. dengan kategori, pola, dan unit tertentu untuk dideskripsikan. Sementara Proses pemberian makna dan signifikansi

pada data disebut interpretasi data. pemeriksaan selesai, memahami contoh-contoh yang jelas, melihat hubungan dan keterkaitan antar deskripsi data yang ada (Barnsley) & Ellis, 1992). Temuan penelitian dalam analisis data kualitatif sangat didasarkan pada tanggapan yang diberikan oleh narasumber atau informan. Oleh karena itu, sebaiknya jangan memulai dengan ide peneliti sendiri dalam melakukan penelitian. berusaha mencocokkan pernyataan para informan, namun jawabannya harus dibandingkan antara sumber, maupun dengan sumber penelitian sebelumnya.

1.9.8 Kualitas Data atau Validitas Data

Triangulasi merupakan teknik sintesis data untuk menentukan kebenaran data. penelitian dipimpin menggunakan strategi pengumpulan informasi paradigma triangulasi lain atau variasinya. Data yang benar atau Teknik triangulasi sudah terbukti kebenarannya. memberi peneliti kepercayaan pada penelitian mereka untuk mencegah mereka dari Kesimpulannya ambigu. Untuk memastikan legitimasinya, eksplorasi ini menggunakan strategi triangulasi sumber informasi.

Sesuai Bodgan dan Taylor (2002), triangulasi informasi harus dimungkinkan dengan mengacu pada pemanfaatan berbagai sumber data untuk mendapatkan perspektif baru mengenai situasi melalui penelitian. lajang. Triangulasi sumber informasi dapat dilakukan dengan cara: membandingkan observasi dengan hasil data atau dokumen yang berkaitan dengan Selain itu, membandingkan hasil wawancara dengan informan 1, 2, 3, dst. Adapun berbagai metode dan sumber pengumpulan data yang digunakan dalam eksplorasi ini meliputi:

1. Data atau dokumen

Data dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian ini. diperoleh dari situs, berita kelompok masyarakat sekitar Kota Lama Semarang, jurnal, dan jurnal kajian terkait. Pentingnya mengumpulkan data untuk penelitian ini. Untuk mengetahui secara rinci tentang pelayanan

publik berdasarkan budaya daerah sehingga dapat dilakukan penelitian. Peneliti akan memiliki pemahaman yang jelas tentang subjek yang dibahas.

2. Observasi

Dapat dikatakan bahwa observasi adalah suatu proses. Secara metodis, persepsi ini bukan sekedar melihat atau mengamati, tetapi juga mampu dideskripsikan oleh peneliti. syarat untuk mempelajari fenomena dengan bantuan panca indera dengan gambaran hasilnya dapat berupa foto atau karangan tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Ekstraksi data menggunakan observasi khusus untuk mendukung data penelitian, dimana peneliti observasi ikut serta secara langsung bagaimana proses pelayanan itu dilakukan.